



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

KOMISI IX DPR RI

**(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
BADAN POM, BKKBN, PT. ASKES, PT. JAMSOSTEK, DJSN DAN BNP2TKI)**

Tahun Sidang : 2010-2011
Masa Persidangan : III
Rapat ke :
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Dengan : Kepala BKKBN
Sifat Rapat : **Terbuka**
Hari/tanggal : Kamis, 20 Januari 2011
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. Selesai
Acara : Membahas Grand Design Kependudukan dan Revitalisasi Program Keluarga Berencana.
Ketua Rapat : Drs. H. Irgan Chairul Mahfiz / Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI
Sekretaris Rapat : Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1
Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Jumlah Kehadiran : 39 orang dari Anggota Komisi IX DPR RI
1 orang izin.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengan Pendapat Komisi IX DPR-RI dengan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dibuka pukul 10.20 WIB setelah kuorum terpenuhi sesuai dengan Peraturan Tata Tertib pasal 245 ayat (1), rapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyampaikan paparan sebagai berikut:
 - A. Hasil pelaksanaan program serta realisasi anggaran tahun 2010
 1. Program Keluarga Berencana
Pada tahun 2010 sasaran peserta KB baru (PB) berdasarkan kontrak kinerja Provinsi (KKP) tahun 2010 diseluruh Indonesia ditetapkan sebanyak 7.784.731. Perolehan PB Nasional bulan Desember 2010 tercatat sejumlah 801.632 peserta atau 10,3% terhadap KKP sehingga pada akhir tahun 2010 mencapai 8.647.024 peserta atau

111,1% dari KKP. Apabila dibandingkan dengan PPM Nasional maka presentase pencapaiannya sebesar 122,06%.

2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja [KKR]

Secara nasional jumlah PIK-Remaja yang harus terbentuk berdasarkan KKP 2010 sebanyak 10.424 kelompok. Berdasarkan data dari Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, dan jumlah PIK-Remaja yang telah terbentuk sebanyak 11.638 kelompok atau 111,6%.

3. Program Ketahanan dan pemberdayaan Keluarga

Secara nasional jumlah keluarga punya balita aktif dalam kelompok BKB yang dijadikan sasaran KKP 2010 sebanyak 2.600.002. Jumlah anggota BKB aktif secara nasional tercatat sebanyak 2.332.287 keluarga. Apabila dibandingkan KKP 2010 maka presentase pencapaian BKB aktif nasional adalah 89,7%.

4. Realisasi Anggaran

Dari pagu anggaran keseluruhan sebesar Rp 1.367.644.433.000,- Realisasi SPM s/d bulan Desember 2010 sebesar Rp 1.338.078.790.000,- atau 97,84%. Sedangkan realisasi SPJ mencapai Rp1.327.950.329.000,- atau 97,10% dari pagu atau 99,24% dari SPM.

B. Grand Design Kependudukan dan Revitalisasi program Keluarga Berencana

a. Grand Design Pembangunan Kependudukan dirancang dengan memanfaatkan ledakan penduduk usia produktif melalui 3 {tiga} pendekatan yaitu:

1. Pengendalian Kuantitas Penduduk melalui Program KB, dan mengatur pola penyebaran penduduk sesuai lapangan kerja yang tersedia.
2. Peningkatan Kualitas Penduduk melalui program Pendidikan dan Kesehatan, serta Pembangunan Keluarga.
3. Pembangunan database Kependudukan, agar kuantitas, kualitas dan distribusi penduduk dapat dipantau setiap saat.

b. Revitalisasi Program Keluarga Berencana diupayakan melalui perubahan mindset strategy manajemen dan kelompok menjadi dua aspek yaitu:

1. Demand Side melalui upaya peningkatan advokasi, KIE, penggerakan masyarakat dan capacity building.
2. Suply Side melalui upaya peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan, peningkatan tenaga pelayanan serta peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB.

2. Grand Design BKKBN perlu di koordinasikan dengan Kementerian/Lembaga terkait agar tidak terjadi overlapping pada program kegiatan di Kementerian lain.
3. BKKBN diharapkan segera menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan sesuai dengan amanat Undang-Undang No.52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
4. Dalam menyalurkan bantuan-bantuan dana, BKKBN agar lebih fokus kepada penanggulangan Keluarga Berencana dan pengendalian penduduk sehingga bantuan-bantuan tersebut lebih tepat sasaran.

5. Mengenai pelatihan tenaga dokter tentang IDU dan Iplan di Puskesmas BKKBN agar lebih memberikan perhatian kepada peran-peran bidan dan perawat karena sudah mempunyai jenjang pendidikan yang meningkat.
6. Untuk membantu penyebaran penduduk yang tidak merata antara pulau jawa dan luar jawa BKKBN agar berkoordinasi dan bekerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi khususnya Dirjen P4 Trans sehingga pertumbuhan penduduk tidak terpusat di Pulau Jawa.
7. BKKBN perlu koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota agar petugas lapangan Keluarga Berencana yang sudah terampil tidak dimutasikan ke dinas atau daerah lain.
8. BKKBN diharapkan mempunyai data-data pertumbuhan penduduk berdasarkan Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dan data tersebut disampaikan kepada Komisi IX DPR RI.
9. Program KB gratis untuk tempat lokalisasi, daerah terisolir dan daerah tertinggal harus ditingkatkan karena di daerah tersebut minim hiburan yang berpengaruh pada tingkat pertumbuhan penduduk.
10. Permasalahan kependudukan khususnya revitalisasi program Keluarga Berencana harus benar-benar dilaksanakan secara serius karena masalah kependudukan pada tahun 2011 datanya sudah mengkhawatirkan.
11. Arah kebijakan pembangunan kependudukan BKKBN yang akan dicapai pada tahun 2011 adalah revitalisasi program KB yang ditekankan pada pembinaan, peningkatan kemandirian KB serta promosi dan pergerakan masyarakat yang didukung pengembangan dan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk.
12. BKKBN agar segera mengkomunikasikan dengan Kementerian Kesehatan tentang penyelesaian berbagai Peraturan Pemerintah yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan UU No.52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

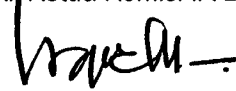
III. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI meminta BKKBN untuk segera menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan sesuai dengan amanat UU No.52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
2. Komisi IX DPR RI mendesak BKKBN untuk lebih serius melakukan percepatan revitalisasi program Keluarga Berencana (KB) dengan memperluas sasaran sosialisasi, memperbaiki metode dan bahasa yang digunakan, serta melibatkan secara aktif organisasi kemasyarakatan dan LSM.
3. Memahami bahwa permasalahan kependudukan sangat kompleks, Komisi IX DPR RI mendesak BKKBN, sebagai lembaga negara yang strategis di bidang kependudukan, untuk terus meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan lembaga/kementerian terkait dan Pemerintah Daerah sehingga arah pembangunan kependudukan searah dengan tujuan pembangunan nasional.
4. Menyikapi persebaran penduduk yang tidak merata, Komisi IX DPR RI meminta BKKBN untuk berkoordinasi dan bekerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

5. Komisi IX DPR RI mengingatkan kembali BKKBN untuk segera mengkomunikasikan dengan Kementerian Kesehatan tentang penyelesaian berbagai Peraturan Pemerintah yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan UU No.52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Rapat ditutup pukul 13.45 WIB.

Jakarta, 20 Januari 2011
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI,



Drs. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ